



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 43 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi, pengelolaan, pemutakhiran, dan penyajian data kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, diperlukan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efektif, akurat, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta mendukung pelaksanaan administrasi kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagai Pendukung Aplikasi Umum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tugas dari Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), yaitu:
  1. Mengelola akun dan hak akses pengguna Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
  2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
  3. Melakukan koordinasi dengan operator dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
  4. Memantau kelengkapan, keakuratan, konsistensi, dan kemutakhiran data kepegawaian yang dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);

5. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data kepegawaian sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku;
  6. Memantau pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian serta menindaklanjuti ketidaksesuaian data yang ditemukan;
  7. Menjaga keamanan akun, kerahasiaan data, dan informasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang membidangi kepegawaian pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Sekretariat Jenderal KPU apabila diperlukan;
  9. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) serta kendala yang dihadapi kepada pimpinan;
  10. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sesuai dengan arahan pimpinan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Tugas dari Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), yaitu:
1. Melakukan penginputan dan pemutakhiran data kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berdasarkan dokumen sumber yang sah;
  2. Melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung data kepegawaian;
  3. Memutakhirkan data identitas pegawai, riwayat jabatan, pangkat dan golongan, pendidikan, pelatihan, serta data kepegawaian lainnya sesuai dengan fitur sistem dan kewenangan yang diberikan;
  4. Melakukan penginputan dan memperbarui data kepegawaian sesuai dengan dokumen resmi dan perubahan kondisi kepegawaian;

5. Mengunggah dokumen pendukung kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan administrasi;
6. Melakukan pengecekan berkala terhadap kelengkapan dan keakuratan data yang telah dimasukkan;
7. Menindaklanjuti koreksi atau perbaikan data berdasarkan hasil pemeriksaan dan arahan Admin atau pejabat yang berwenang;
8. Menginventarisasi kendala teknis maupun administratif dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan melaporkannya kepada Admin;
9. Menjaga keamanan akun serta kerahasiaan data dan dokumen kepegawaian yang dikelola;
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian kepada Admin atau pimpinan sesuai kebutuhan;
11. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengoperasian (SIMPEG) sesuai dengan arahan pimpinan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 18 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

TOTOK SINGGIH H



SUGITO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
(SIMPEG)

| No | Nama                   | Jabatan dalam Kedinasan                            | Jabatan dalam Tim |
|----|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Sugito, S.IP           | Kasubbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Admin             |
| 2  | Putri Dwi Wuryanti, SH | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan       | Operator          |
| 3  | Widodo                 | Pengolah Data dan Informasi                        | Operator          |

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 18 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.  
  
TOTOK SINGGIH H

